

Golkar dan Pemilu 1992

Wahono

Sebagai organisasi sosial politik peserta pemilihan umum adalah wajar kalau Golongan Karya (GOLKAR) ingin memenangkan kembali Pemilu 1992 nanti. Lebih dari itu GOLKAR ingin menang secara lebih berkualitas. Itu berarti bahwa GOLKAR akan berusaha keras untuk tampil lebih baik di mata rakyat pemilih, dan ikut berperan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu tersebut pada setiap tahapnya. Dengan demikian kemenangan GOLKAR dalam Pemilu 1992 sekaligus mengandung arti peningkatan kualitas demokrasi kita secara bermakna.

Ada tiga alasan pokok mengapa GOLKAR harus memenangkan Pemilu 1992 yaitu:

- (1) Untuk menjamin kelanjutan proses perealisasi tekad Orde Baru melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen;
- (2) Untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka

mewujudkan masyarakat industri modern yang maju berdasarkan Pancasila dalam Era Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJPT-II);

- (3) Untuk memantapkan Format Politik Baru dan meningkatkan kualitas bekerjanya mekanisme sistem politik Demokrasi Pancasila yang sedang dibangun.

II

Sebagaimana diketahui Orde Baru lahir dengan latar belakang kemelut politik yang berkepanjangan. Pada waktu itu bangsa kita boleh dikata tidak berkesempatan memahami, menghayati dan membudayakan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak lama setelah Proklamasi bangsa kita disibukkan oleh revolusi mempertahankan kemerdekaan. Kemudian sebentar memasuki Republik Indonesia Serikat (RIS) dan selanjutnya bernaung di bawah UUDS 1950 dengan Demokrasi Liberalnya. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan

kembali ke UUD 1945 pada mulanya memang membawa harapan besar. Tapi sistem Demokrasi Terpimpin yang menyertainya justru melakukan berbagai macam penyimpangan terhadap konstitusi itu.

Selama 20 tahun lebih merdeka bangsa kita mengalami ketidakstabilan politik yang berkepanjangan yang diwarnai oleh pertentangan ideologi dan politik yang tajam. Kabinet silih berganti, pemberontakan-pemberontakan bersenjata meletus, dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat terus merosot. Pemilihan Umum 1955 yang diharapkan akan membawa kestabilan politik, meredakan pertentangan ideologi, dan kesempatan untuk memulai pembangunan ekonomi, ternyata justru memperburuk situasi dan kondisi. Jumlah partai politik bukannya makin sedikit, malahan makin bertambah. Meskipun ada empat partai besar (PNI, Masyumi, NU dan PKI) yang dihasilkan oleh Pemilu 1955, tak ada satu pun yang meraih mayoritas suara dan kursi. Bahkan tidak ada satu partai pun yang memperoleh 25% suara dalam Pemilu tersebut. Demikianlah Pemilu 1955 memperkuat Format Politik Lama yang banyak partai, tanpa ada yang memiliki mayoritas suara dan kursi. Sistem politik Demokrasi Liberal yang berlaku pada waktu itu bukan saja tidak stabil, tetapi juga tidak dimungkinkan untuk dapat bekerja secara wajar dan sehat. Situasi tersebut menunjukkan bahwa sistem politik model itu memang tidak cocok bagi bangsa Indonesia.

Di zaman Demokrasi Terpimpin ada upaya untuk menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi tidak dapat dikatakan bermakna. Di samping Masyumi dan PSI yang memang sudah dibubarkan, jumlah partai yang diperkenankan terus hadir masih banyak, yaitu 10 buah. Sementara itu pertentangan ideologi dan politik justru makin menajam yang akhirnya bermuara pada meletusnya Peristiwa G30S/PKI yang

nyaris menghancurkan bangsa dan negara kita.

PKI yang mendapat angin di zaman Demokrasi Terpimpin berusaha keras dengan menghalalkan segala macam cara, termasuk teror politik terhadap mereka yang dianggap lawannya, untuk berkuasa dan mengkomunikasikan Indonesia. Sementara itu mereka yang melihat bahaya PKI ini menyusun kekuatan pula untuk menghadapi tantangan PKI. Di kalangan pimpinan ABRI, terutama Angkatan Darat, kekhawatiran terhadap bahaya PKI ini meningkat dan untuk menghadapinya berusaha menjalin kerja sama dengan kekuatan-kekuatan yang setia kepada Pancasila, dan anti-komunis. Kekuatan-kekuatan ini kemudian berhimpun ke dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya (GOLKAR) yang kemudian menjadi GOLKAR yang kita kenal sekarang ini.

Demikianlah semenjak proses kelahirannya di zaman Demokrasi Terpimpin GOLKAR telah memiliki ikatan batin dan historis yang dalam dengan ABRI. Ikatan batin dan sejarah itu direkat dengan persamaan visi dan persepsi untuk memperjuangkan tegak dan terlaksananya Pancasila dan UUD 1945.

Setelah makar politik G30S/PKI berhasil dihancurkan dan Orde Baru muncul ke permukaan, maka adalah wajar kalau ABRI dan GOLKAR menjadi pemrakarsa dan pendukung utama dari tekad Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Tekad tersebut adalah konsekuensi logis dari persamaan visi dan persepsi ABRI dan GOLKAR terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang merekat ikatan batin dan historis mereka. Dari situ tersimpul satu dari tiga alasan untuk memenangkan kembali GOLKAR dalam Pemilu 1992 nanti. Yaitu untuk menjamin pelaksanaan tekad Orde

Baru dalam melaksanakan Pancasila dan Orde Baru secara murni dan konsekuen.

Sebagaimana diketahui, Orde Baru juga berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang dengan terlebih dahulu memberikan prioritas bidang ekonomi. Pelaksanaan pembangunan nasional ini berkaitan erat dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Logikanya, pelaksanaan pembangunan nasional juga merupakan realisasi tekad Orde Baru itu. Itulah sebabnya mengapa kita menjadikan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional kita memilih strategi bertahap dengan formula stabil-dinamis. Strategi bertahap mengandung makna bahwa secara realistis pembangunan itu hanya mungkin dapat dilaksanakan setahap demi setahap, tidak mungkin sekali jadi. Membangun adalah suatu proses yang panjang, bukan ibarat lampu Aladin yang ajaib, *simsalabim* lalu jadi. Pada tiap tahap pembangunan kita dapat mengevaluasi apa-apa yang sudah berhasil dicapai, apa-apa yang belum, dan persoalan-persoalan baru apa yang muncul. Berdasarkan itu kita dapat membuat rencana yang lebih tepat dan lebih cermat untuk tahap berikutnya.

Formula stabil-dinamis dari pembangunan mengandung arti bahwa keberhasilan pembangunan tersebut tergantung pada kehadiran suasana kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang stabil dan sekaligus juga dinamis. Kestabilan diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung tanpa gangguan-gangguan yang mengalihkan perhatian kepadanya. Sedangkan dinamika berfungsi bukan saja

untuk menjaga agar kestabilan yang ada tidak mengalami stagnasi, tetapi sekaligus juga menunjukkan pentingnya meningkatkan kualitas pembangunan nasional itu sendiri dari satu tahap ke tahap berikutnya; antara lain ditinjau dari segi perencanaan, pelaksanaan, partisipasi, pendistribusian hasil serta tanggungjawab, dan pengawasannya. Ditinjau dari dimensi politik, dinamika itu mengandung arti peningkatan kualitas sistem politik demokrasi Pancasila yang sedang dibangun secara bertahap pula. Bersamaan dengan itu bangsa kita membangun dirinya dan sekaligus merealisasikan tekadnya untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen.

Menjelang berakhirnya Pelita V dan juga Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT-I) yang tengah dilaksanakan sekarang ini kita mencatat hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai di berbagai bidang kehidupan bangsa dan negara. Dunia mengakui kemajuan yang telah kita capai seperti dalam bidang ekonomi, pertanian, industri, transportasi dan pariwisata, pendidikan, komunikasi dan informasi, kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan, kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kebudayaan, kestabilan politik dan HANKAM. Kita mengetahui dan mengakui bahwa masih ada kelemahan dan kekurangan yang belum dapat dipecahkan secara memuaskan, seperti kesenjangan sosial, kasus-kasus korupsi dan penyelewengan, ketertinggalan dalam IPTEK, masalah pertanahan dan hukum. Sungguhpun begitu, neraca pembangunan sejauh ini jelas memperlihatkan bahwa keberhasilannya jauh lebih banyak daripada kelemahan dan kekurangannya. Itulah sebabnya mengapa kita yakin bahwa pada akhir Pelita V dan PJPT-I kerangka landasan pembangunan sudah akan mantap untuk memasuki Era Tinggal Landas dalam PJPT-II.

Sebagai organisasi sosial politik terbesar di zaman Orde Baru ini, GOLKAR bersama-sama keluarga besarnya memainkan peranan yang sangat instrumental dalam menyukseskan pembangunan nasional ini dari satu tahap ke tahap berikutnya. Mulai dari menghimpun aspirasi masyarakat, merumuskannya ke dalam rencana pembangunan, melaksanakannya, mengawasinya, menikmati hasil-hasilnya, sampai kepada memikul tanggungjawab terhadap kelemahan dan kekurangannya yang masih ada dan perlu diperbaiki. Dalam rangka mengembangkan masukan untuk GBHN 1993, GOLKAR semenjak dua tahun yang lalu telah menghimpun aspirasi-aspirasi yang hidup dalam masyarakat melalui kader-kadernya dari bawah sampai ke atas. Aspirasi-aspirasi dari bawah itu sedang diramu GOLKAR menjadi program-program yang akan diperjuangkannya dalam Sidang Umum MPR 1993, terutama untuk GBHN 1993. Melalui itu GOLKAR bersama-sama keluarga besarnya sedang menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menyumbangkan pikiran buat menyusun Rencana PJPT-II yang cermat dalam rangka memenuhi keinginan bangsa kita untuk menjadi masyarakat industri modern yang maju berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dari situ jelas terlihat kebijaksanaan politik GOLKAR untuk meneruskan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila menuju masyarakat industri modern yang maju. Itulah alasan kedua bagi kemenangan GOLKAR dalam Pemilu 1992 nanti, yaitu untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

IV

Ditinjau dari segi politik, sukses pembangunan nasional tercermin dalam lan-

dasan dan kerangka sistem politik Demokrasi Pancasila yang sudah berhasil kita bangun sejauh ini. Hal itu terlihat dari kehadiran lembaga-lembaga politik yang dikehendaki oleh UUD 1945, seperti lembaga-lembaga politik di supra struktur. Di infra struktur kita telah berhasil menyederhanakan sistem kepartaian dari yang jumlahnya banyak (10) menjadi tiga organisasi sosial politik, yaitu PPP, GOLKAR dan PDI. Kita juga telah berhasil melaksanakan Pemilu secara reguler, dan pada tiap Pemilu GOLKAR berhasil memenangkan mayoritas suara. Pemilu telah menjadi titik awal dari siklus lima tahunan dalam kehidupan politik demokrasi, yang kemudian diikuti dengan Sidang Umum MPR yang antara lain menghasilkan GBHN, memilih Presiden/Mandataris dan Wakil Presiden. Bersamaan dengan itu kita sesungguhnya sedang membangun dan melembagakan sistem politik menjadi sistem politik Demokrasi Pancasila yang konstitusional dan berdasarkan hukum sesuai dengan tekad Orde Baru.

Konsensus nasional dalam Sidang Umum MPR 1978 tentang P-4 merupakan terobosan penting dalam kehidupan politik dalam rangka memasyarakatkan dan membudayakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi nasional. Konsensus nasional yang dicapai melalui paket lima undang-undang bidang politik tahun 1985 untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan terobosan penting lain dalam kehidupan politik. Terobosan ini bukan saja penting dalam arti mengakhiri pertentangan ideologi yang pernah ada dalam diri bangsa, tetapi sekaligus juga memberi rangsangan baru bagi bangsa kita untuk memahami, menghayati, membudayakan dan mengamalkan Pancasila. Bersamaan dengan itu proses membangun budaya politik Demokrasi Pancasila mel-

lui pendidikan politik dapat lebih ditingkatkan.

Meskipun demikian, GOLKAR juga tidak menutup mata tentang masih adanya kelemahan dan kekurangan dalam sistem politik Demokrasi Pancasila yang sedang kita bangun dan lembagaikan. Sesuai dengan pengamatan masyarakat GOLKAR juga melihat bahwa belum semua lembaga politik kita berfungsi sebagaimana mestinya. DPR, misalnya, meskipun sudah makin berfungsi tetapi masih perlu meningkatkan kualitas. Demikian pula halnya dengan organisasi-organisasi sosial politik dan kemasyarakatan yang dinilai oleh banyak orang, terutama para pakar, dalam kadar yang berbeda-beda masih belum begitu mandiri dan berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satu masalah berat yang tampak masih dihadapi oleh orpol dan ormas ini adalah kesulitan dalam mengembangkan mekanisme demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Demokrasi Pancasila di dalam dirinya. Hal itu antara lain berkaitan erat dengan kenyataan bahwa bangsa kita masih dalam proses mewujudkan budaya politik Demokrasi Pancasila di dalam dirinya. Bangsa kita yang tengah berada dalam masa transisi ini sedang mengalami transformasi atau pembaharuan budaya politik, dari budaya politik lama menjadi budaya politik baru, yaitu budaya politik Demokrasi Pancasila. Itulah sebabnya kita kadang-kadang masih melihat adanya sikap dan tingkahlaku politik yang kurang atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat, termasuk di kalangan tokoh politik dan pemimpin lainnya.

Sebagaimana dapat dilihat, kelemahan dan kekurangan yang masih ada pada umumnya bersifat kualitatif. Sejalan dengan itu masalah pembangunan politik yang kita hadapi sekarang dan di masa datang terutama bersifat keperluan untuk

meningkatkan kualitas sistem politik Demokrasi Pancasila secara bertahap dan bermakna. Memang peningkatan kualitas bukannya tidak ada. Kalau kita teliti pelaksanaan Pemilu selama empat kali yang telah dilalui di zaman Orde Baru ini, maka peningkatan kualitas itu telah terjadi secara cukup bermakna. Dalam Pemilu 1992 nanti GOLKAR sangat berkeinginan untuk lebih meningkatkan lagi kualitas penyelenggaraannya. Itulah sebabnya mengapa GOLKAR sejak awal sudah mencanangkan tekadnya untuk memenangkan lagi Pemilu 1992 secara lebih berkualitas.

V

Sistem politik Demokrasi Pancasila yang sedang kita bangun ini dapat diibaratkan sebagai sistem politik demokrasi dalam transisi. Ini disebabkan oleh sistem politik Demokrasi Pancasila yang masih dalam proses pelebagaan untuk menjadi sistem politik demokrasi yang handal, yaitu sistem politik yang memiliki kualitas kemandirian yang tinggi sehingga memungkinkannya untuk berkembang secara terus-menerus. Kapasitas dan kapabilitas sistem politik Demokrasi Pancasila yang tinggi juga menumbuhkan sikap responsif terhadap aspirasi masyarakat yang terus berkembang dan tuntutan zaman yang sering berubah.

Yang menarik perhatian ialah, meskipun sistem politik Demokrasi Pancasila ini masih pada taraf transisi menuju kemantapan atau kemapanannya, ia terbukti mampu berfungsi sehingga memungkinkan terlaksananya pembangunan di segala bidang, termasuk bidang politik. Dengan segala kelemahan dan kekurangannya yang sekaligus mencerminkan kualitasnya yang masih relatif rapuh, sistem politik ini memperlihatkan perjalanan cerita suksesnya semenjak Orde Baru lahir. Sambil

menyempurnakan dirinya secara bertahap, sistem politik Demokrasi Pancasila yang sedang kita bangun ini sekaligus berhasil melaksanakan pembangunan nasional dengan sukses. Oleh sebab itu, kunci keberhasilannya perlu dicari dan dipelajari.

Ada beberapa anggapan bahwa kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional ini terletak pada keberhasilan Orde Baru dalam menciptakan dan memantapkan Format Politik Baru yang relevan dengan sistem politik Demokrasi Pancasila yang sedang dibangun sehingga memungkinkan bekerja dengan baik dalam mendukung pembangunan nasional. Sesuai dengan formula pembangunan nasional, Format Politik Baru ini berhasil menciptakan, mengembangkan dan memantapkan suasana kehidupan politik yang stabil-dinamis. Pada tahap permulaan sewaktu sistem politik itu masih sangat rapuh, kestabilan politik mendapat tempat yang dominan dibandingkan dengan dinamika masyarakat. Semakin kadar kerapuhannya berkurang, dinamika masyarakat makin mendapat ruang gerak dalam sistem politik, sejauh hal itu tidak membahayakan kestabilan politik yang diperlukan. Bilamana dinamika masyarakat memperlihatkan gejala-gejala yang mencemaskan, maka kestabilan politik kembali kepada posisinya yang lebih dominan. Dan sebaliknya, suasana kehidupan politik stabil-dinamis yang bersifat elastis itu berkembang menjadi kondisi obyektif politik baru, yang memungkinkan bekerjanya sistem politik Demokrasi Pancasila yang telah kita bangun semenjak Orde Baru lahir.

Untuk lebih memahami makna positif dari kondisi obyektif politik baru yang dihasilkan oleh Format Politik Baru, perlu kita membandingkannya dengan kondisi obyektif politik lama yang diciptakan dan dikembangkan oleh Format Politik Lama. Pertama, sistem banyak partai merupakan

salah satu ciri dari Format Politik Lama, baik di zaman Demokrasi Liberal maupun di masa Demokrasi Terpimpin. Ciri kedua ialah bahwa tidak ada satu partai pun yang berhasil menang dengan mayoritas suara dalam Pemilu yang pernah diadakan (1955) atau memiliki mayoritas kursi di lembaga perwakilan. Kedua ciri tersebut telah menciptakan dan mengembangkan ketidakstabilan politik yang diwarnai oleh pertentangan ideologi dan politik yang tajam. Itulah kondisi obyektif kehidupan politik yang diciptakan dan dikembangkan oleh Format Politik Lama yang mengakibatkan sistem politik yang ada dan berlaku pada waktu itu, Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, tidak mampu bekerja.

Berbeda dengan Format yang lama, Format Politik Baru yang diciptakan dan dimantapkan oleh Orde Baru ini telah berhasil menyederhanakan sistem banyak partai menjadi tiga organisasi sosial politik seperti sekarang ini. Hal itu sekaligus menjadi salah satu cirinya. Ciri keduanya adalah kenyataan bahwa salah satu dari ORSOSPOL itu, yaitu GOLKAR, berhasil keluar sebagai pemenang dengan mayoritas suara yang komfortabel (*comfortable majority*) dalam empat kali Pemilu yang telah diselenggarakan di zaman Orde Baru ini. Di samping itu, GOLKAR bersama-sama keluarga besarnya berhasil pula memiliki mayoritas kursi yang komfortabel di MPR dan DPR. Sebagai mayoritas yang besar mereka berfungsi sebagai basis kekuatan yang menjadi pendukung utama Presiden/Mandataris dengan kabinetnya. Kehadiran basis atau pendukung utama yang kuat seperti itu menjamin kehadiran kestabilan politik yang dinamis selama Orde Baru ini. Itulah kondisi obyektif politik baru yang dibawa, dipelihara dan dimantapkan oleh Format Politik Baru yang sekarang ini.

Kenyataan bahwa Format Politik Baru ini telah berhasil menciptakan dan me-

mantapkan suasana kehidupan politik stabil-dinamis sebagai kondisi obyektif politik baru yang memungkinkan bekerjanya sistem politik Demokrasi Pancasila yang sedang dibangun kiranya tidak mungkin dapat dibantah oleh siapapun. Bersamaan dengan itu, kenyataan bahwa sistem politik ini telah berhasil membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang jauh lebih baik dari zaman-zaman sebelum Orde Baru lahir merupakan cerita sukses yang juga tidak dapat dibantah. Logikanya, Format Politik Baru ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan sistem politik Demokrasi Pancasila yang sedang dibangun yang telah membuktikan keberhasilan bekerjanya dalam menyukseskan pembangunan nasional di segala bidang selama ini. Pemantapan Format Politik Baru ini jelas merupakan pilihan terbaik untuk meningkatkan bekerjanya mekanisme sistem politik Demokrasi Pancasila yang sedang kita bangun untuk menyukseskan PJPT-II menuju masyarakat industri modern yang maju berdasarkan Pancasila. Kemenangan GOLKAR kembali dalam Pemilu 1992 akan menjamin pemantapan Format Politik Baru ini. Itulah alasan ketiga mengapa GOLKAR harus menang dalam Pemilu 1992 nanti dengan suara dan kursi mayoritas yang komfortabel seperti atau sama dengan hasil Pemilu 1987 yang lalu.

VI

Sebagaimana dapat dipahami dari seluruh uraian di atas tekad GOLKAR untuk memenangkan Pemilu 1992 dengan suara dan kursi mayoritas yang besar bukanlah untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk kepentingan seluruh rakyat, bangsa dan negara. Kemenangan itu dimaksudkan untuk menjamin penerusan realisasi tekad Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konse-

kuen. Ia juga dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam rangka mewujudkan masyarakat industri modern yang maju dalam Era Tinggal Landas nanti. Kemenangan itu diperlukan untuk semakin memantapkan Format Politik Baru yang telah terbukti memiliki relevansi yang sangat kuat dengan sistem politik Demokrasi Pancasila yang tengah dibangun; kemantapan tersebut merupakan suatu keharusan dalam menciptakan, memelihara dan mengembangkan kondisi obyektif politik baru yang berfungsi positif guna menyukseskan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tekad Orde Baru.

Tekad GOLKAR untuk menang secara lebih berkualitas menyimpulkan konsistensi komitmennya untuk meningkatkan mutu sistem politik Demokrasi Pancasila yang sedang dibangun dalam prosesnya menuju sistem politik yang mantap dan handal sehingga memungkinkannya berfungsi secara efektif dalam PJPT-II atau Era Tinggal Landas nanti.

Ada dua hal pokok yang sedang dilakukan GOLKAR untuk meningkatkan mutu demokrasi dalam kaitannya dengan tekadnya memenangkan Pemilu 1992 secara berkualitas. Pertama, proses penyeleksian calon-calon GOLKAR untuk menjadi wakil-wakil rakyat di MPR, DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD tingkat II. GOLKAR mengembangkan mekanisme penyeleksian yang demokratis yang memungkinkan kalangan Keluarga Besar GOLKAR mengajukan calon-calon yang dianggapnya pantas masuk ke dalam proses penyeleksian. Sejumlah kriteria obyektif dipakai dalam proses seleksi di samping kriteria standar seperti PDLT. Di samping itu, GOLKAR juga memberikan perhatian penting kepada generasi muda, wanita, cendekiawan kelompok strategis lainnya,

aspirasi masyarakat setempat di mana si calon akan dipasang. Melalui itu semua GOLKAR akan dapat mencalonkan tokoh-tokohnya yang betul-betul kapabel dan representatif.

Makna kapabel dan representatif ini terutama diukur melalui dua kriteria pokok, di samping kriteria-kriteria lain yang telah dikemukakan sebelumnya. Pertama, untuk MPR dan DPR, si calon perlu memiliki wawasan nasional yang mantap, terutama karena MPR dan DPR mengolah masalah-masalah yang bersifat nasional. Di situ kadar kapabilitasnya menjadi pusat perhatian. Kedua, si calon perlu mempunyai pengetahuan yang dalam tentang masyarakat setempat yang akan diwakilinya. Melalui itu dia diharapkan akan dapat menyerap aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Di situ kadar representatifnya yang menjadi perhatian. Bilamana dalam diri seorang calon terdapat kombinasi yang baik dari kedua kriteria ini, maka dia diperkirakan akan dapat meramu aspirasi masyarakat setempat yang diwakilinya ke dalam kepentingan nasional melalui wawasan nasional yang dimilikinya. Dengan

demikian kepentingan nasional yang berhasil dirumuskannya bersama-sama dengan wakil-wakil rakyat yang lain akan memiliki relevansi yang kuat bukan saja dalam ruanglingkup nasional, tetapi juga dalam ruanglingkup masyarakat setempat yang diwakilinya. Maka menjadilah dia tokoh nasional yang sekaligus representatif bagi masyarakat setempat yang diwakilinya.

Memang tidak mungkin semua calon GOLKAR akan dapat memenuhi kedua kriteria pokok itu dengan baik dan memuaskan. Yang ingin dikemukakan GOLKAR ialah agar rakyat tahu bahwa di samping kriteria-kriteria lain, kedua kriteria itu juga dipakai dalam proses menyeleksi calon. Dari situ terlihat kesungguhan upaya GOLKAR untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita.

Upaya lain untuk tujuan yang sama ialah komitmen GOLKAR untuk ikut meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu 1992. GOLKAR ingin menang karena kekuatan kualitas diri dan pengabdianya kepada masyarakat, bangsa dan negara dalam Pemilu yang berkualitas pula.

